



**Judul** : Panja RUU Minerba resmi dibentuk  
**Tanggal** : Jumat, 14 Februari 2020  
**Surat Kabar** : Bisnis Indonesia  
**Halaman** : 23

| PERTAMBANGAN |

## Panja RUU Minerba Resmi Dibentuk

Bisnis, JAKARTA — Keinginan revisi UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba) mulai menunjukkan titik terang.

Pemerintah dan DPR RI secara resmi telah membentuk panitia kerja (Panja) revisi Rancangan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba).

Pembentukan Panja ini disepakati dalam Rapat Kerja antara Komisi VII DPR bersama dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Gedung DPR, Kamis (13/2).

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan Panja ini akan membahas lebih detail dan khusus terkait Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Minerba.

“Kita sudah jelas segala sesuatu terlebih khusus substansi belum disetujui dibahas lebih lanjut dalam rapat Panja. Dengan ini Panja RUU Minerba dinyatakan dibentuk,” ujarnya.

Tim Panja terdiri dari 86 orang yang mana 26 orang merupakan anggota Komisi VII DPR RI yang diketuai Bambang Wuryanto dan 60 orang berasal dari pemerintahan baik Kementerian ESDM maupun Kementerian Perindustrian.

Selain itu, juga ada dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang diketuai Dirjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono.

Sebagai tindak lanjut pembentukan Panja, Sugeng menuturkan Panja ini dijadwalkan akan mengadakan rapat pada Senin (17/1) untuk membahas RUU Minerba.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengucapkan terima kasih pada anggota dewan karena telah memberikan dukungan untuk revisi UU Minerba ini.

Dia berharap proses pembahasan RUU Minerba dapat segera diselesaikan.

“Kami atas nama pemerintah menyampaikan terima kasih atas dukungannya. Kami berharap proses pengesahan RUU Minerba dapat diselesaikan dengan spirit kedua belah pihak,” tuturnya.

Revisi UU Minerba ini merupakan inisiatif DPR RI periode 2014—2019. Namun, belum terselesaikannya pembahasan sehingga dilanjutkan oleh DPR RI periode 2019—2024 di mana juga masuk dalam Program Legaslatif Nasional (Prolegnas) tahun ini.

Revisi UU Minerba diketahui akan merombak sejumlah ketentuan, termasuk insentif yang bisa diperoleh perusahaan tambang.

Sebelumnya, pengamat hukum pertambangan Universitas Tarumanagara Ahmad Redi mengatakan pembahasan RUU Minerba yang sudah berjalan sebelumnya tak perlu di-*carry over* atau dilimpahkan kepada DPR periode 2019—2024. Pasalnya, substansi RUU ini masih belum bulat antarkementerian dan konsepnya belum mantap.

“RUU ini dibahas secara terburu-buru, dilakukan secara sporadis di akhir masa jabatan anggota DPR 2014—2019,” ujarnya. (Yanita Petriella)